



DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN “KEMENAG SULTRA BERSAHABAT” TERHADAP PENCIPTAAN KONDISI DAMAI

IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF THE “FRIENDLY SULTRA MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS” POLICY ON THE CREATING OF PEACEFUL CONDITIONS

Rahmad*

Kanwil Kemenag Provinsi
Sulawesi Tenggara

*Penulis Korespondensi:
rahmadlibyah@gmail.com

Disubmit: 21 Desember 2022

Revisi: 21 Januari 2023

Diterima: 20 Februari 2023

Abstrak

Artikel ini menguraikan tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menggagas suatu gerakan yang cemerlang yaitu “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat”, sebuah ikhtiar dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dan mempercepat implementasi budaya hidup yang bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi. Gerakan ini sebagai bentuk responsifitas yang bersifat spontan dari Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara terhadap program Kementerian Agama RI dan Program Pemerintah Provinsi Sultra. Konsep gerakan Kemenag Sultra Bersahabat ini lebih implementatif dan aplikatif karena digagas dalam rangka menjabarkan visi, misi dan program unggulan Kemenag RI dalam rangka mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul serta menjabarkan program unggulan Pemerintah Provinsi Sultra, Garbarata melalui lima pilar utama, yaitu Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Berbudaya dan Beriman serta Sultra Produktif, sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Dalam tulisan ini mensinergikan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat. Bagaimana peranan Kanwil Kementerian Agama dalam mengimplementasi gerakan tersebut di kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta bagaimana pengaruhnya pada penciptaan kehidupan yang harmonis yang damai dalam bingkai 3-B (Bersama Bersatu, Bersaudara).

Kata Kunci : Kemenag Sultra, Bersahabat, Kondisi Damai

Abstract

This article describes about the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Southeast Sulawesi Province initiated a brilliant movement, namely the “Friendly Southeast Sulawesi the Ministry of Religious Affairs Movement”, an initiative from the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Southeast Sulawesi Province to strengthen and accelerate the implementation of a culture of clean, religious, polite, harmonious life based on technology. This movement is a spontaneous form of responsiveness from the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Southeast Sulawesi to the programs of the Indonesian the Ministry of Religious Affairs and the Southeast Sulawesi Provincial Government Program. The concept of the Friendly Southeast Sulawesi the Ministry of Religious Affairs movement is more implementable and applicable because it was initiated in order to describe the vision, mission and flagship program of the Indonesian the Ministry of Religious Affairs in order to create a pious, moderate, intelligent and superior society and outlines the flagship program of the Southeast Sulawesi Provincial Government, Garbarata through five main pillars, namely Smart Southeast Sulawesi, Healthy Southeast Sulawesi, Concerned Poverty Southeast Sulawesi, Cultured and Faithful Southeast Sulawesi and Productive Southeast Sulawesi, according to the tasks and functions carried out by the Ministry of Religious Affairs. This paper synergizes the Friendly Southeast Sulawesi the Ministry of Religious Affairs Movement. What is the role of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in implementing this movement in the socio-economic life of the community, and how does it affect the creation of a peaceful harmonious life within frame (Together, United, Brothers).

Keywords : The Ministry of Religious Affairs Southeast Sulawesi, Friendly, Peaceful Conditions

PENDAHULUAN

Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam menerapkan Gerakan Kementerian Agama Sulawesi Tenggara Bersahabat merupakan komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan konsep program prioritas Menteri Agama, yaitu: (1) penguatan moderasi beragama, (2) transformasi digital, (3) tahun toleransi beragama, (4) revitalisasi KUA, (5) *religiosity index*, (6) kemandirian pesantren, dan (7) *Cyber Islamic University*. Ketujuh program Menteri Agama RI tersebut sangat relevan dengan program Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini “Gerakan Bersahabat” terutama konsep penguatan moderasi beragama, tahun toleransi beragama, transformasi digital, *religiosity index*, dan kemandirian pesantren.

“Gerakan Bersahabat” yang merupakan akronim bersih, religius, santun, harmonis, dan berbasis teknologi. Gerakan ini identik dengan karakter *'moralexcellence'* atau akhlak terpuji. Karakter mulia ini, akan bermakna ketika dilandasi oleh ajaran agama dan adanya nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam budaya lokal masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pembudayaan karakter bersahabat secara khusus diarahkan pada upaya pembiasaan hidup sesuai karakter yang diembannya yaitu karakter bersih, karakter religius, karakter santun, karakter harmonis, dan penguasaan teknologi terutama bagi umat beragama dan pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama, madrasah, pondok pesantren. Selain itu, pembudayaan karakter bersahabat dapat pula diaplikasikan di dalam majelis-majelis

Agama, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemahasiswaan. Ujung tombak sekaligus role model dalam sosialisasi dan pembudayaan karakter bersahabat adalah para penyuluh agama se-Sulawesi Tenggara. Semua *stakeholder* ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama harus dilibatkan dalam memasifkan program gerakan Kemenag Bersahabat (Mustamin. 2021: 3). Untuk itu, Zainal Mustamin menjelaskan bahwa pembiasaan karakter terpuji dalam lingkup Kementerian Agama Sulawesi Tenggara tersebut pada gilirannya turut mendorong terbentuknya karakter bersahabat bagi umat beragama di Sulawesi Tenggara.

Dampak positif pelaksanaan Kebijakan “Gerakan Bersahabat” ini akan lebih terimplementasikan apabila diawali pada ASN Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara itu sendiri. Selain itu, ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, baik ASN Kantor Urusan Agama (KUA), ASN madrasah (negeri/swasta) maupun pondok pesantren menjadi pionir dalam mengaplikasikan “Gerakan Bersahabat” ini. Implementasi “Gerakan Bersahabat” ini pula dapat dilakukan melalui majelis agama, organisasi sosial keagamaan melalui penyuluh atau tokoh agama di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut, dapat dilakukan melalui sosialisasi “Gerakan Bersahabat” ini terutama terhadap dalam berperilaku sikap spiritual, sikap sosial, untuk menciptakan kondisi yang damai di masyarakat.

Dalam praktik pelaksanaan di rumah ibadah, di madrasah (MI, MTs, MA), pondok pesantren (Ponpes), sekolah minggu, dan pasraman, misalnya materi pelajarannya dikemas dalam bentuk terintegratif dan tidak disajikan dalam materi tersendiri, tetapi nilai karakter bersahabat selain

diintegrasikan dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran juga diintegrasikan pada pembudayaan dalam interaksi edukatif.

Hidup dengan hati yang bersih, diri yang bersih, dan lingkungan yang bersih telah menjadi kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia khususnya umat beragama, pegawai dan Dharma Wanita Kementerian Agama. Terlebih lagi performa dalam kehidupan individu yang religius, santun, dan harmonis akan menjadi penyempurna untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Untuk mencapai hal tersebut tentu dimulai dari kesadaran dalam menciptakan lingkungan kehidupan yang bersahabat.

“Gerakan Kemenag Bersahabat” diharapkan menjadi sebuah gerakan kultural masyarakat tentang pentingnya hidup yang bersih, memiliki sifat religius, karakter santun, serta selalu harmonis, dan selalu dilandasi kemampuan teknologi yang baik. Artinya, untuk memasyarakatkan dan mensinergikan program pemerintah daerah Sultra maka semua instansi, baik pemerintah maupun swasta berkewajiban menjabarkan secara detail dan lebih implementatif di lingkungan atau unit kerja masing-masing.

Upaya membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan produktif, sangat relevan dengan “Gerakan Bersahabat”, sebuah ikhtiar dari Kementerian Agama Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dan mempercepat implementasi budaya hidup bersahabat. Gerakan ini sebagai bentuk responsifitas yang bersifat spontan dari Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara terhadap program Kementerian Agama RI dan Program Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Konsep Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat ini lebih aplikatif dan implementatif karena sengaja digagas untuk menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kementerian Agama RI dalam mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul serta menjabarkan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini “Garbarata” yang dikenal lima pilar, yaitu: Sultra yang Cerdas, Sultra yang Sehat, Sultra yang Peduli Kemiskinan, Sultra yang Berbudaya dan Beriman serta Sultra yang Produktif.

Gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” sangat tepat diterapkan di dalam satuan kerja Kanwil Kementerian Agama, satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Selain itu, dapat pula diterapkan di lingkungan Dharma Wanita, sekolah umum, di kalangan madrasah dan pondok pesantren. Pada sekolah nonformal juga dapat diterapkan di lingkungan Pasraman, Sekolah Minggu. Di kalangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Agama, Rumah Ibadah, ormas keagamaan, penyuluh agama se Sulawesi Tenggara dapat menjadi garda yang terdepan untuk mengimplementasikan hal tersebut. Semua komponen yang disebutkan di atas memiliki tanggung jawab moral dan menjadi lokomotif utama dalam mengimplementasikan gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat”.

Pertanyaannya adalah: mengapa Kementerian Agama yang merupakan instansi vertikal tetap memandang perlu bersikap proaktif menerjemahkan dan mengimplementasikan program pemerintah provinsi? Hal ini, karena Kementerian Agama selain sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah setempat juga sebagai instansi yang memiliki mandat pokok membina kehidupan beragama masyarakat

di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, di sisi lain, pembinaan agama itu sendiri tidak harus melalui kegiatan ceramah di rumah ibadah atau majelis taklim, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mentransformasikan nilai-nilai spiritual ke dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Agar lebih bermakna, maka nilai-nilai agama harus dijadikan sebagai landasan spiritual terhadap derap langkah pembangunan.

Di tengah masifnya pemberlakuan “Gerakan Bersahabat” tidak luput dari tantangan baik internal maupun eksternal. Salah satunya adalah konflik sosial yang sempat menggeliat di Kabupaten Buton, yaitu terjadi konflik sosial ekonomi di masyarakat dengan peristiwa pembakaran rumah (<https://regional.kompas.com/read/2021/11/23/084317178/kerusuhandibuton>).

Konflik sosial dalam masyarakat terdiri dari 4 macam, mulai dari perbedaan individual hingga perubahan sosial yang terlalu cepat. Konflik sosial adalah proses untuk mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi ketika ada individual atau kelompok yang saling bertentangan dalam interaksi. Faktor penyebab konflik sosial meliputi: perbedaan perorangan, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat. Sebagai gejala sosial, konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat. Ini terjadi karena setiap individual atau kelompok memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, atau dukungan sosial (<https://www.gramediacom/literasi/pengertian-konflik>).

Berdasarkan hal tersebut, munculnya tantangan konflik sosial tersebut, tentunya

kehadiran “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” menjadi penting. Karena hal tersebut menjadi instrumen dan sebagai media penangkal konflik sekaligus mampu untuk menjawab solusi atau alternatif penyelesaian masalah internal maupun tantangan eksternal tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam *policy paper* ini adalah: (1) Bagaimana dampak pelaksanaan Kebijakan "Kemenag Sultra Bersahabat" Terhadap Penciptaan Kondisi Damai di Sulawesi Tenggara? (2) Apa yang menyebabkan konflik sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton? (3) Apa yang dilakukan Masyarakat Kota Kendari untuk menjaga kedamaian dan kerukunan di masyarakat? Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan data dan informasi tentang: (1) Dampak pelaksanaan Kebijakan "Kemenag Sultra Bersahabat" Terhadap Penciptaan Kondisi Damai di Sulawesi Tenggara; (2) Faktor yang menjadi penyebab konflik sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton; serta (3) Upaya Masyarakat Kota Kendari dalam menjaga ke damaian dan kerukunan di masyarakat.

Adapun manfaat *policy paper* ini meliputi: manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat regulasi. *Pertama*, manfaat teoretis, diharapkan dalam penelitian tentang “Dampak Pelaksanaan Kebijakan “Kemenag Sultra Bersahabat” Terhadap Penciptaan Kondisi Damai” ini akan menemukan pengembangan konsep atau teori tentang penciptaan kondisi damai, di mana penelitian ini merupakan upaya untuk mengembangkan pemikiran menjadi dimensi baru dari fenomena sosial ekonomi masyarakat, yang akan melayani sektor jasa dengan referensi khusus ke sektor Pendidikan Tinggi

dan mengembangkan dimensi-dimensi agamis. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk menelusuri tantangan utama yang muncul di lingkungan masyarakat baik pada sektor pendidikan maupun sosial ekonomi masyarakat. *Kedua*, manfaat praktis, diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat di Sulawesi Tenggara dan menjadi acuan dalam perencanaan strategis dan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas, bagi semua jajaran pimpinan dan *stakeholder* terkait. *Ketiga*, manfaat regulasi, diharapkan dalam penelitian ini menjadi bahan referensi bagi peneliti atau melanjutkan penelitian pengembangan terhadap “Dampak Pelaksanaan Kebijakan “Kemenag Sultra Bersahabat” Terhadap Penciptaan Kondisi Damai” dengan mengambil tema dan substansi tema yang berbeda.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup makalah kebijakan ini adalah dampak pelaksanaan kebijakan Kemenag Sultra Bersahabat terhadap penciptaan kondisi damai dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi di Kabupaten Buton dan kerukunan di Kota Kendari yang terdiri dari: (1) Dampak pelaksanaan kebijakan "Kemenag Sultra Bersahabat" terhadap penciptaan kondisi damai di Sulawesi Tenggara; (2) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton; serta (3) Upaya masyarakat Kota Kendari dalam menjaga kedamaian dan kerukunan di masyarakat.

Kerangka Teori dan Konseptual

Konsep Kemenag Sultra Bersahabat

Konsep makna istilah “Kemenag Sultra Bersahabat”, meskipun dalam penjelasan terdahulu sekilas telah disinggung. Kemenag Sultra merupakan akronim dari Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Kata “bersahabat” menurut Zainal Mustamin merupakan akronim dari “bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi” (Mustamin, 2021: 4). Istilah ini menjadi platform gerakan, arah pembudayaan dan pembentukan karakter masyarakat dalam lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Sultra. Meski secara struktural Kementerian Agama merupakan instansi vertikal, tetapi keberadaannya menjadi mitra yang cukup strategis sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang ada dalam struktur pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu, gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” hadir sebagai wujud dari tanggung jawab moral Kementerian Agama Sulawesi Tenggara terhadap percepatan pembangunan Pemerintah Daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainal Mustamin (2021: 4) bahwa istilah bersih dan religius merupakan karakter dasar kehidupan yang terinspirasi dari *habluminallah*, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, menjadi pribadi yang bersih hati, bersih diri, bersih lingkungan, dan senantiasa taat dan patuh kepada Tuhan sebagai respons terhadap tantangan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) berintegritas yang menopang pelaksanaan tugas di bidang tata kelola reformasi birokrasi.

Istilah “santun dan harmonis” menurut Zainal Mustamin (2021: 4) yang dikutip oleh Rahmad dalam Jurnal yang berjudul:

Gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” dalam Perspektif Perencanaan: Suatu Kajian Teori dan Praktik Perencanaan Partisipatif, Mustamin menjelaskan bahwa santun dan harmonis terinspirasi dari *habluminannas*, hubungan manusia kepada sesama manusia yang merupakan karakter utama masyarakat Sulawesi Tenggara untuk membangun budaya hidup yang moderat, toleran, rukun, dan damai. Selanjutnya, Zainal Mustamin menjelaskan bahwa istilah “berbasis teknologi” terinspirasi dari *hablumminal ardhi*, yaitu hubungan manusia kepada alam semesta, sebagai respons terhadap upaya menjalani kehidupan di bumi yang semakin mudah, cepat, praktis, dan simpel sesuai tuntutan kemajuan sains dan teknologi. Meskipun dimaknai secara terpisah, tetapi ke semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu karakter hidup yang perlu dibudayakan pada masyarakat dan umat beragama di Sulawesi Tenggara (Mustamin, 2021: 4).

Dengan demikian, karakter bersih dan religius, karakter santun dan harmonis berbasis teknologi merupakan karakter yang tampak pada watak seseorang, tabiat, akhlak atau kepribadiannya yang mendorong seseorang untuk memiliki budaya dan kebiasaan hidup yang bersih, religius dan lainnya. Hal ini, terbentuk dari hasil internalisasi dari berbagai bentuk kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai dasar dan landasan terhadap sudut pandang, cara berpikir dan bersikap, serta bertindak. Terkait dengan kebajikan maka aspek ini merupakan sejumlah nilai, moral, dan norma yang tampak dalam interaksi sosial seseorang dengan orang lain dalam kehidupan kesehariannya. Karakter demikian pada gilirannya akan membentuk

kepribadian bangsa yang bermartabat. Karena itu, pengembangan karakter suatu bangsa tentunya dapat direalisasikan melalui peningkatan karakter individu. Dalam praktiknya manusia hidup dalam lingkungan sosial ekonomi, lingkungan budaya yang heterogen untuk itu, pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pembinaan dan pembudayaan karakter bersahabat dapat dilakukan dalam bentuk proses edukasi yaitu melalui suatu proses pendidikan baik formal, informal dan nonformal dan mengintegrasikannya dengan lingkungan sosial, budaya masyarakat sekitar dan budaya bangsa Indonesia (Mustamin, 2021: 4).

Atas dasar inilah, pembinaan dan pembudayaan “Gerakan Bersahabat” sangat relevan dan strategis untuk dilaksanakan terutama bagi pengembangan karakter masyarakat Sulawesi Tenggara yang berkeadaban di masa-masa mendatang. Pengembangan dimaksud perlu dilakukan melalui pendekatan perencanaan partisipatif termasuk unsur pendukungnya dalam hal ini perlu ditunjang dengan pendanaan melalui DIPA yang memadai untuk “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat”.

Selain itu, perlu ditunjang melalui pendekatan sosiokultural masyarakat Sulawesi Tenggara. Pembinaan dan pembudayaan karakter bersahabat diimplementasikan melalui usaha bersama unit kerja dalam lingkup Kementerian Agama, seperti: madrasah, Ponpes, KUA, dan sejumlah majelis agama, organisasi profesi berbasis keagamaan dan organisasi sosial keagamaan. Dalam implementasinya gerakan dan aksinya dilakukan senada

dan seirama dari seluruh komponen *stakeholder*.

Konsep Konflik

Secara etimologis, istilah “konflik” berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu: kata “*con*” yang memiliki makna ‘bersama’ dan kata “*fligere*” yang bermakna ‘benturan’ atau tabrakan (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 345). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konflik sosial mengandung makna suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas tertentu sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Selanjutnya, Coser mendefinisikan konflik sosial adalah suatu perjuangan terhadap nilai sosial dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Irving M., 1998: 156).

Dalam pengertian lain, konflik juga berarti sesuatu pertentangan, percekocan, dan perselisihan, sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota komunitas atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005: 587). Konflik, yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005: 587). Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005: 587).

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Selanjutnya, konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik tersebut dilangsungkan bukan hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi kelompok, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingan.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antarkelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politik seseorang atau kelompok.

5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara (Soerjono Soekanto, 1992: 86).

METODOLOGI

Kategori penelitian ini termasuk penelitian lapangan, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1993: 63).

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan dari orang sendiri atau perilaku yang diamati (Khosin Afandi, 1993: 30).

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik: (1) sumber data diperoleh dari data alami, (2) peneliti adalah instrumen kunci, (3) laporannya sangat deskriptif, (4) analisisnya bersifat induktif, (5) verifikasi data dilakukan melalui triangulasi, (6) partisipan, (7) sampelnya bersifat *purposive* (W. Mantja, 2005: 50-51). Selain itu, penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik lainnya, yaitu: (1) latar alamiah, (2) manusia sebagai alat (instrumen), (3) analisis data secara induktif, (4) teori dari dasar (*grounded theory*), dan (5) deskriptif (Moleong, 2004: 4-5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat”

Implementasi kebijakan “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” ini dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip dan pendekatan, antara lain: *Pertama*, berkelanjutan, yang mengandung maksud bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan, dengan melibatkan partisipasi langsung *stakeholder* terkait. Hal ini penting dilakukan, mengingat proses pengembangan nilai-nilai atau karakter bersahabat kepada masyarakat merupakan sebuah proses panjang yang dimulai sejak dini baik melalui pendidikan formal, informal maupun non formal.

Dalam prinsip berkelanjutan ini, hal yang dilakukan di masyarakat Kota Kendari, misalnya untuk merawat kerukunan di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik adalah melalui program bersahabat dengan cara melibatkan seluruh *stakeholder* terkait untuk menjadi role model. Di setiap Kecamatan dilibatkan para penyuluh agama untuk membina mental anak-anak melalui pengajian, pasraman, dan sekolah minggu. Hal ini, berlaku secara berkelanjutan, materinya pun dikemas untuk membuat karakter lebih baik masyarakatnya terutama pembinaan sejak dini anak-anak melalui pembiasaan hidup bersih dan religius, santun harmonis dan yang paling utama untuk mendampingi anak-anak untuk memanfaatkan teknologi dan menggunakan sosial media secara bijak. Dengan diimplementasikan hal ini secara kontinu dapat menangkal dini terjadinya hal yang tidak diinginkan terutama tawuran dan konflik sosial lainnya di masyarakat.

Demikian pula halnya di Kabupaten Buton, konflik sosial yang sempat melanda masyarakatnya karena dipicu oleh konflik sesama anak muda antara dua desa bertentangan. Akibatnya, terjadi pembakaran puluhan rumah di masyarakat. Sebagai upaya untuk meredam konflik yang terjadi adalah melalui pendekatan sosial kultural dan pendekatan religius. Solusinya adalah dengan melibatkan *stakeholder* terkait, seperti: Kepala Kemenag, Kepala KUA, Ketua Majelis Taklim, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat bersatu meredam dan menyelesaikan konflik internal maupun eksternal yang terjadi. Kehadiran “Gerakan Bersahabat” menjadi penting. Dengan pembinaan secara berkelanjutan oleh *stakeholder* terkait, sehingga semakin menciptakan kedamaian di masyarakat. Hal ini, didukung dengan pelibatan para pihak terkait untuk memahami pentingnya hidup yang harmonis, karakter santun dan hidup bersih dan religus.

Faktanya, saat ini tidak adalagi konflik laten yang muncul, baik di daerah konflik maupun di daerah lainnya. Apalagi untuk memberikan penguatan pemahaman beragamanya setiap hari Selasa dijadwalkan *zoom meeting* terpusat di Kanwil Kemenag Sultra dengan melibat seluruh *stakeholder* terkait di Kabupaten dan Kota.

Kedua, partisipatif, di mana semua *stakeholder* internal dan eksternal maupun *stakeholder* lainnya dalam lingkup Kementerian Agama Sulawesi Tenggara turut terlibat secara aktif mulai dari rencana pelaksanaan sampai evaluasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam prinsip ini, faktanya, seluruh ASN, baik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ikut terjun berpartisipasi

aktif dalam membina masyarakat baik melalui forum formal maupun nonformal baik melalui ceramah agama maupun melalui sosialisasi dan kaderisasi “Gerakan Bersahabat”. Seperti di Kantor Urusan Agama ribuan penyuluh Agama dilibatkan untuk mensosialisasikan “Gerakan Bersahabat” ini. Demikian pula halnya dengan guru dan uztas, pendeta, dan pandita, baik di lembaga formal maupun nonformal ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan karakter bersahabat di lingkungannya.

Ketiga, integratif dan membudaya, yang mensyaratkan bahwa proses membangun karakter bersahabat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dapat dilakukan secara integratif baik melalui kegiatan pendidikan di mana nilai karakter tersebut dipadu dalam setiap langkah pendidikan dan pengajaran maupun diintegrasikan atau diselipkan pada materi penyuluhan agama di mana pun dan dalam waktu kapan pun. Karena itu, peran para penyuluh agama dan penghulu serta Kepala Kantor Urusan Agama tidak kalah pentingnya.

Faktanya, masyarakat di sekitarnya menjadi sadar dan turut aktif menggelorakan karakter bersahabat ini sebagai kebutuhan. Dengan demikian, akan terciptalah kehidupan yang damai dan sejahtera. Dampaknya pun semakin tampak karena tidak ada lagi konflik sosial yang muncul di masyarakat.

Keempat, pengembangan religiusitas, yang mengandung makna bahwa nilai karakter bersahabat tidak hanya diintegrasikan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, namun juga penguatan budaya religius dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan.

Fakta penting dalam hal ini adalah dengan penciptaan budaya bersahabat di lingkungan kerja masing-masing. Di madrasah misalnya, memang penting mengajarkan perlunya hidup bersih dan religius, santun dan harmonis kepada peserta didik, namun yang lebih penting dari semua itu adalah membudayakan lingkungan madrasah yang memiliki karakter tersebut, sehingga hal ini menjadi kebiasaan yang pada gilirannya akan terbawa ke dalam kehidupan peserta didik pada masyarakat di sekitarnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana sumber nilai karakter dapat ditemukan? Setidaknya, nilai karakter bersih dan religius, santun dan harmonis, jujur dan bertanggung jawab digali dari empat sumber, yaitu:

1. Agama sebagai sumber nilai karakter yang utama. Mengapa harus menggali nilai karakter dari sumber ajaran agama? Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang agamis. Karena itu, setiap kehidupan manusia baik individu, masyarakat maupun bangsa selalu dilandasi oleh ajaran agama yang menjadi pedoman hidup di dunia dan akhirat.
2. Pancasila, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegakkan atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan tingkat pluralitas yang tinggi, baik plural dari etnik dan budaya maupun keyakinannya terhadap Allah SWT (Tuhan yang Maha Esa). Dalam konteks ini, Pancasila tidak sekadar sebagai common platform namun sekaligus menjadi pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi

suatu nilai-nilai yang mengatur kehidupan ekonomi, masyarakatan, budaya, termasuk di dalamnya politik dan hukum.

3. Budaya masyarakat setempat dalam hal ini Kota Kendari dan Kabupaten Buton. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu sendiri. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan nilai-nilai budaya juga menjadi sumber nilai dalam pengembangan karakter bersih, religius, santun, harmonis, jujur, dan bertanggung jawab.
4. Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan tentang kualitas karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dalam berbagai jenjang dan jalur. Faktanya nyaris tidak ada perbedaan antara rumusan tujuan pendidikan nasional dengan budaya hidup bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi yang menjadi substansi dari gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat”. Untuk itu, tujuan pendidikan nasional dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau regulasi yang paling operasional dalam pengembangan karakter bersahabat tersebut.

Terdapat lima nilai karakter yang dibudayakan dalam kehidupan masyarakat melalui Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, yaitu:

1. Karakter hidup bersih yang dimaksud adalah budaya bersih yang didasarkan atas kesadaran spiritual, sosial, dan cinta terhadap lingkungan. Karena mendasarkan atas kesadaran spiritual, maka budaya hidup bersih dimulai dari bersih diri yang memiliki pengertian cukup luas. Bersih diri pada “Gerakan Bersahabat” ini lebih ditekankan pada perilaku jujur, disiplin dan bertanggung jawab baik dalam kaitan tugas sebagai pamong maupun dalam kapasitasnya sebagai umat yang beragama. Dari bersih kepada diri inilah dengan sendirinya memunculkan karakter religius, santun, harmonis dan responsif terhadap kemajuan teknologi.
- b. Sikap dan karakter “religius”, yaitu perilaku seseorang yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, serta memiliki sikap toleran terhadap perbedaan dan menyadari sepenuhnya atas pluralitas masyarakat. Sikap demikian dipastikan memunculkan karakter santun dalam bertutur kata dan anggun harmoni dalam performa keseharian hidupnya. Sikap “santun” diindikasikan dengan tutur kata yang ramah, etis, dan moralis dari masing-masing pribadi dari umat beragama dan pegawai Kementerian Agama.
- c. Bersih diri dapat juga dimaknai karakter dan berperilaku “jujur dan santun”, yaitu sikap seseorang yang selalu berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang untuk selalu dipercayai baik dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan.
- d. Sikap harmonis maksudnya sikap moderat, toleran, rukun, dan damai dalam kaitannya dengan interaksi antarumat beragama dan pegawai

- Kementerian Agama. Perilaku cinta kasih, saling menolong, saling menghargai merupakan sikap yang agamis bagi seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi.
5. Berbasis teknologi adalah kemampuan pegawai dan umat beragama dalam mengakses dan memanfaatkan layanan teknologi yang terus berkembang dan lebih mutakhir.

Dalam konteks ini, implementasi “Gerakan Kemenag Bersahabat” menjadi penting, karena gerakan ini menuntut keterlibatan semua *stakeholder* untuk bersinergi di dalam mengimplementasikan gerakan ini. Mekanisme pelaksanaan gerakan ini dimulai dari penyusunan panduan, kemudian melakukan sosialisasi guna memberi pemahaman secara menyeluruh kepada *stakeholder* Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Setelah seluruh unsur yang terkait memiliki kesepahaman mengenai “Gerakan Kemenag Bersahabat” ini, selanjutnya menentukan langkah-langkah operasionalnya yang secara teknis ditentukan oleh masing-masing satuan unit kerja di bawah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Namun secara garis besarnya, mekanisme pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan masing-masing unit kerja baik yang selama ini menjadi kegiatan rutin maupun membuat kegiatan yang relevan (Mustamin, 2021: 15).

Untuk mempercepat perwujudan visi tersebut, maka ikhtiar membangun karakter positif dalam visi tersebut tidak hanya menjadi tugas Kementerian Agama RI dan Pemprov. Sultra, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua *stakeholder* yang terkait khususnya di Sulawesi Tenggara. Di antara *stakeholder* dimaksud adalah Kanwil

Kementerian Agama Provinsi sebagai inisiator gerakan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dharma Wanita, Kantor Urusan Agama, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan, Majelis Agama, organisasi keagamaan dan para tenaga penyuluh agama atau tokoh agama se Sulawesi Tenggara.

Dampak Positif Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat

Dampak “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” dalam menciptakan kehidupan damai terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Buton dan Kota Kendari sangat signifikan. Dalam “Gerakan Bersahabat” ini sangat terkenal dengan *tagline* 3-B (Bersama, Bersatu, Bersaudara): Bersama kita bisa, Bersatu kita kuat, Bersaudara kita rukun. Dengan mengimplementasikan hidup bersama kita bisa, maka konsekuensinya kehidupan antarwarga masyarakat menjadi ringan karena saling mendukung. Seperti yang diterapkan dalam program Wali Kota Kendari “Persaudaraan Madani” yang kuat membantu yang lemah saling membutuhkan satu sama lain simbiosis mutualisme.

Selanjutnya, dengan menerapkan kehidupan bersatu, maka akan tercipta suasana persatuan, dengan bersatu akan tercipta solidaritas yang kuat dalam bermasyarakat dengan prinsip berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Demikian pula halnya bersaudara kita rukun maka akan tercipta kehidupan toleran dan semakin menguatkan komitmen moderasi beragama.

Dengan pemberlakuan gerakan Kemenag Bersahabat di Sultra ini, maka akan terciptalah suasana yang damai.

Fakta di lapangan khususnya di Kota Kendari dan Kabupaten Buton yang disinyalir rawan terjadi konflik sosial tidak ada lagi konflik yang muncul. Hal ini, membuktikan bahwa peran aktif dari “Gerakan Bersahabat” ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat karena konsep ini sangat dekat dengan kultur sosial masyarakatnya.

Dengan diimplementasikannya “Gerakan Bersahabat” ini sampai saat ini konflik itu tidak pernah ada lagi. Kehidupan masyarakatnya menjadi kondusif. Sosial kemasyarakatan berjalan rukun dan damai. Kehidupan sosial ekonomi pun kembali normal. Mereka kembali hidup rukun dan damai tanpa ada gesekan di dalam kehidupannya.

Kendala Teknis dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat

Dalam praktik pelaksanaannya, kebijakan pemberlakuan “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” tentunya terdapat beberapa kendala teknis. Namun hal tersebut tidak serta merta gerakan ini tidak berjalan dengan baik. Kendala utamanya, adalah masih adanya *stakeholder* Kanwil Kemenag Sultra yang menganggap kebijakan pemberlakuan “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” bisa berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan dukungan dana yang memadai. Namun, hal tersebut tidak menjadikan terhambatnya kebijakan ini. Kebijakan “Gerakan Kemenag Sultra” tetap berjalan sesuai dengan harapan penentu kebijakan. Paham keterbatasan dana dalam setiap pemberlakuan kebijakan tidak perlu dibudayakan. Kendala lain, adalah masih adanya ASN yang belum paham tupoksi masing-masing sehingga terkesan ikut-ikutan tapi tetap melaksanakan kebijakan.

Solusi Penyelesaian Konflik di Buton

Konflik yang terjadi saat ini di Indonesia adalah konflik antaretnis. Untuk itu, harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi kongkritnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antaretnis yang ada di sebuah daerah atau kabupaten, di mana mediasi harus dilaksanakan pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dari daerah sampai pusat. Cara penyelesaian konflik adalah memberikan pola mediasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan pola rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni:

1. Konflik itu harus di manajemen menuju rekonsiliasi.
2. Mengubah sistem pemahaman agama.
3. Meminimalisir adanya paham eksklusivisme dengan berpenampilan hura-hura dalam konteks kehidupan beragama.
4. Untuk menghindari konflik etnis, perlu upaya meredam nafsu distingsi (Wirawan, 2010: 245).

Untuk itu, gerakan budaya bersahabat terlebih dahulu dibangun melalui aparatur yang memiliki nilai karakter yang diamanahkan dalam “Gerakan Bersahabat” ini. Perwujudan diri dan lingkungan yang bersih dan religius, santun dan harmonis ini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran, pengkondisian dan pembudayaan nilai karakter tersebut yang pada gilirannya mempengaruhi karakter masyarakat Sulawesi Tenggara.

Karena gerakan bersahabat ini merupakan gerakan moral dan kultural, maka teknis pelaksanaannya bersifat fleksibel dan dengan pendekatan, semi struktural, sehingga tidak terikat oleh aturan birokrasi yang bersifat strukturalisme dan formalisme. Meski demikian, peran birokrasi tetap mutlak diperlukan, karena secara struktural pelaksanaan “Gerakan Bersahabat” ini tetap berada dalam tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Sebagai wujud tanggung jawab, dituntut kesiapannya sebagai *leader* sekaligus *supervisor*. Sebagai *leader*, tidak hanya menunjukkan kapan dan bagaimana cara melaksanakannya, namun sekaligus sebagai teladan atau *role model* dalam membangun karakter yang bersih dan religius, santun dan harmonis di unit kerja yang dipimpinnya.

Selanjutnya, meski pembinaan karakter melalui pembudayaan, maka dalam pelaksanaannya menjadi lebih akseleratif bila diintegrasikan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Mengingat karakter bersahabat dipandang urgen untuk segera dibumikan dalam pikiran, sikap, perilaku masyarakat dan umat beragama di Sulawesi Tenggara dan lembaga pendidikan berbasis agama, Kantor Urusan Agama, organisasi keagamaan serta penyuluh agama, menjadi pelaku utama dalam melaksanakan gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” melalui proses internasialisasi karakter dimaksud dan membudayakannya dalam aktivitas keseharian di masyarakat.

Upaya yang dilakukan melalui “Gerakan Bersahabat” ini dengan mengadakan dialog internal umat beragama dan dialog

antarumat beragama. Selain itu, untuk merawat kerukunan dan kedamaian masyarakat sebagai upaya meredam konflik berkepanjangan telah dilakukan deklarasi kebangsaan antarumat beragama, deklarasi dengan 1000 tokoh masyarakat dalam hal ini menghadirkan para paguyuban dan umat beragama yang dikemas dalam bentuk kirab dan festival.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Merawat Kehidupan Damai di Kota Kendari

Kebijakan pelaksanaan “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” sangat relevan dengan program Walikota Kendari, yaitu “Persaudaraan Madani”. “Persaudaraan Madani” merupakan program Walikota Kendari sebagai bagian dari penjabaran yang dihasilkan dari kombinasi antara konsep bina spiritual dengan konsep bina sosial ekonomi yang tertuang dalam model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Kendari. Demikian pula halnya dengan “Gerakan Bersahabat” yang digelontorkan oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra yang sangat konsentrasi pada pembinaan karakter religus santun dan harmonis.

Saat ini, “Persaudaraan Madani” adalah wadah bersifat kekeluargaan. Di mana keluarga mampu memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak mampu. Gerakan ini dilakukan atas dasar kesadaran sosial yang tinggi. Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi dapat mengangkat derajat kehidupan saudaranya yang tidak mampu. Mekanisme yang dilakukan dalam “Persaudaraan Madani” ini adalah melalui pola pemberdayaan secara ikhlas. Secara umum, program tujuan pelaksanaan “Persaudaraan Madani”

adalah mewujudkan hubungan sosial yang harmonis antar-sesama warga kota dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat miskin yang berdaya guna dan berhasil guna (Perwalikota Kendari Nomor 17 Tahun 2008).

Dalam konsteks ini, “Gerakan Kemenag Bersahabat” di Sultra, khususnya di Kota Kendari sangat tepat untuk mendukung program Walikota “Persaudaraan Madani” ini demikian pula sebaliknya. Dengan 3-B Bersama, Bersatu, dan Bersaudara akan tercipta suasana yang damai dan sejahtera antara yang kuat dan lemah saling seiring sejalan. Dengan demikian, akan tercipta rasa aman yang merupakan bingkai kerukunan. Demikian pula halnya dengan indahnya toleransi merupakan lambang persaudaraan yang terbungkus dalam harmoni kehidupannya itu bersama, bersatu bersaudara.

Sasaran utama dari program “Persaudaraan Madani” yaitu: (1) Mempercepat program pengentasan kemiskinan di Kota Kendari; (2) Terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama warga kota; (3) Menggugah warga masyarakat mampu untuk peduli dan membantu saudaranya yang kurang mampu. Dalam konteks ini, sasaran pokok pepadani adalah mengurangi tingkat kemiskinan, di antaranya: angkatan kerja, penduduk berusia kerja, yaitu antara 15 tahun hingga 65 tahun, yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Proses implementasi program pepadani khususnya aspek lapangan kerja. Tahapan implementasi dari program pepadani berdasarkan pengamatan yang dilakukan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program “Persaudaraan Madani” dalam aspek lapangan kerja, diawali dengan sosialisasi Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2008 melalui dua tahap, yaitu: tahap *pertama* di mana pembuat kebijakan dalam hal ini Walikota Kendari memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan yang akan menjadi motor penggerak program Pemadani, dan tahap *kedua* adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Kendari.
2. Pendataan penduduk mampu dan tidak mampu dalam aspek lapangan kerja. Tujuan dari pendataan ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk Kota Kendari yang berada dalam garis kemiskinan serta penduduk yang memiliki tingkat kehidupan yang mapan atau diklasifikasikan sebagai penduduk mampu.
3. Penjualan profil dan penandatanganan kesepakatan persaudaraan dalam aspek lapangan kerja. Implementasi program ini adalah penjualan profil keluarga miskin kepada keluarga mampu, dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta persaudaraan. Sebelum ikatan persaudaraan dilakukan diawali dengan proses penyajian profil keluarga miskin yang telah disiapkan yang merupakan wujud dari proses pendataan yang dilakukan sebelumnya, dan dalam proses ini dikenal dengan penjualan profil kepada keluarga mampu. Apabila keluarga mampu tertarik untuk melakukan ikatan persaudaran maka keluarga diperkenankan untuk memilih calon saudaranya. Pemilihan yang dilakukan oleh keluarga mampu dimaksudkan agar keluarga mampu mengetahui apa yang menjadi harapan

keluarga tidak mampu, dan apa yang perlu mendapat perhatian dari keluarga miskin yang kelak dijadikan saudaranya agar keluarga mampu dapat memfasilitasinya melalui mekanisme pemberdayaan.

Berdasarkan kondisi di lapangan yang diperoleh, bentuk pengawasan atau monitoring program “Persaudaraan Madani” pada aspek lapangan kerja adalah melakukan kunjungan ke keluarga miskin dalam kurung waktu tertentu dengan tujuan menggali informasi mengenai ikatan persaudaraan keluarga mereka dengan saudara angkatnya sejauh mana dampak pemberdayaan dalam lapangan kerja yang ia dapatkan terhadap pendapatan dan kehidupannya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, komunikasi pada keluarga miskin yang memilih aspek lapangan kerja dalam pemberdayaannya masih perlu dimaksimalkan, hal tersebut disebabkan oleh masih ditemukannya keluarga miskin yang belum memahami secara jelas mengenai arah, tujuan, dan bentuk pemberdayaan aspek lapangan kerja pada program “Persaudaraan Madani”, sehingga mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai program “Persaudaraan Madani”. Pendataan Penduduk mampu dan tidak mampu dalam aspek lapangan kerja selain tahap sosialisasi, faktor komunikasi juga mempengaruhi tahap implementasi program khususnya dalam pendataan penduduk mampu dan tidak mampu pada aspek lapangan kerja.

Dalam pengamatan yang dilakukan di lapangan, komunikasi yang tidak terbangun di lapangan dengan baik justru terjadi oleh pemerintah dalam berkoordinasi dengan

instansi terkait yang memiliki kompetensi dan fungsi yang sesuai bidang tugasnya masing-masing dalam hal ini dinas terkait, seperti Dinas Sosial Kota Kendari.

Pendataan penduduk miskin khususnya dalam aspek lapangan kerja seharusnya tidak perlu dilakukan, sehubungan dengan dimilikinya data tersebut oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Kendari dan data tersebut dapat diperoleh melalui koordinasi antara kedua Dinas tersebut, namun pada kenyataannya koordinasi itu tidak berjalan dengan baik antara kedua bidang tugas di lingkup Kota Kendari tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pelaksanaan program pada aspek lapangan kerja dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya peralatan dan perlengkapan, seperti sarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada tidak optimalnya tiga tahapan pelaksanaan kegiatan program dalam aspek lapangan kerja, adapun tahapan yang dimaksud adalah tahap sosialisasi, pendataan penduduk, dan tahap monitoring dan pengawasan ikatan persaudaraan dalam aspek lapangan kerja.

Pelaksana (implementor) program “Persaudaraan Madani” sebaiknya tidak dibentuk dari pegawai yang memiliki tupoksi tertentu, melainkan harus independen, yang terdiri dari tim khusus (*project officer*) sebagai pelaksana lapangan yang tidak terpengaruh dari kegiatan dan rutinitas lain. Dalam pelaksanaan program “Persaudaraan Madani” diharapkan ada koordinasi yang baik dengan dinas terkait utamanya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Nakertransos) Kota Kendari untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan program pepadani khususnya pemberdayaan dalam aspek lapangan kerja.

Pemerintah dalam melahirkan program kegiatan, utamanya yang bertema pemberdayaan sebaiknya dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program dapat lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan yang jelas.

Seperti halnya “Gerakan Bersahabat” dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah selaku penentu kebijakan, tokoh masyarakat selaku penanggung jawab di masyarakat, tokoh agama yang senantiasa menyampaikan edukasi melalui siraman rohani, dan tokoh adat selaku penanggung jawab adat istiadat di masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program utamanya pada proses sosialisasi program, dapat lebih mengena baik secara sosiokultural maupun spiritual pada masyarakat.

Pilihan/Alternatif Kebijakan

Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat, maka komponen pertama yang harus dibenahi adalah generasi muda di dalamnya ada para siswa maupun santri. Apabila tidak dibina sejak dini, maka konflik pergaulan inilah yang sering memicu konflik di masyarakat. Seperti disinggung terdahulu bahwa pembudayaan karakter bersahabat di madrasah, pondok pesantren, pasraman, dan sekolah minggu dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, pengintegrasian dalam mata pelajaran, dan pengembangan proses pembelajaran. Wujud nyata dari pelaksanaan program tersebut akan melahirkan sekolah bersih hijau (*green school*) yang memberikan kontribusi nyata terhadap kesuksesan program Pemerintah Provinsi.

Pembudayaan karakter bersahabat tersebut di lingkungan pendidikan dilakukan melalui program pengembangan diri yang terintegrasi dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan, antara lain:

1. Kegiatan rutin, yaitu merupakan kegiatan jalur pendidikan dan pengajaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal di sekolah atau pondok pesantren, atau melalui pendidikan nonformal di pasraman dan sekolah minggu. Contoh paling sederhana misalnya, mengembangkan budaya hidup bersih dari diri sendiri melalui pemeriksaan kebersihan diri secara berkala. Misalnya; kebersihan pakaian, anggota badan, kelas atau kamar santri di pesantren, dan lainnya. Pelaksanaan ibadah secara berjamaah di rumah ibadah atau tempat lainnya yang disediakan untuk tempat ibadah. Membudayakan doa sebelum dan sesudah melakukan berbagai aktifitas baik guru ustadz maupun siswa/santri, membudayakan salam dalam setiap perjumpaan dengan siapa pun di sekolah, pesantren atau di mana pun tempatnya. Dan masih banyak lagi karakter bersih dan religius yang dapat dibudayakan di lembaga pendidikan agama dalam hal ini di, madrasah dan ponpes.
2. Kegiatan spontanitas, adapun kegiatan yang dilakukan secara spontan oleh siswa, santri dan guru atau ustadz setelah melihat perilaku yang kurang baik dan bertentangan dengan substansi gerakan Kemenag Sultra Bersahabat. Misalnya, membuang sampah bukan pada tempatnya, membuat keributan hingga mengganggu ketenangan dan

kenyamanan orang lain, berperilaku tidak terpuji, berpakaian kurang sopan, sikap tidak toleran dan sebagainya.

3. Keteladanan, yaitu perilaku atau karakter seluruh *stakeholder* pendidikan dapat dijadikan sebagai roll model atau teladan bagi masyarakat dengan menampilkan perilaku bersih, religius, santun, dan harmonis. Keteladanan ini diperankan oleh guru dan pengasuh agar siswa atau santri meneladani dan membiasakan karakter positif dan religius. Sebab, “jika guru dan tenaga kependidikan menghendaki agar peserta didik membiasakan berperilaku positif sesuai budaya yang berlaku di masyarakat dan karakter berbangsa dan bernegara yang baik, maka merekalah orang yang pertama dan utama memberikan teladan”. Sebab, tidak ada kurikulum yang paling baik dan paling ideal melainkan sikap dan perilaku guru itu sendiri.

Untuk itu, merekalah yang pertama bersikap disiplin agar karakter disiplin bisa dibudayakan. Merekalah yang harus berpenampilan rapi, berbudaya hidup bersih, agamis, toleran terhadap perbedaan dan menghormati orang lain, jujur terhadap amanah dan pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan kemajuan teknologi.

Untuk menciptakan kedamaian di masyarakat, maka perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pada tataran penentu kebijakan. Di samping itu, para tokoh agama, tokoh masyarakat sangat berperan aktif dalam hal ini. Untuk itu, pembudayaan karakter bersahabat di masyarakat ini sangat urgen untuk dilakukan.

Pembinaan dan pengembangan karakter bersahabat berlangsung secara kontinyu membutuhkan pendekatan integratif sehingga terjadi saling menguatkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya termasuk *stakeholder* terkait seperti majelis agama, organisasi sosial keagamaan melalui tokoh agama dan penyuluh agama di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, “Gerakan Bersahabat” ini lebih menekankan pada aspek sikap spiritual, sikap sosial, dan respon atas kemajuan sains dan teknologi. Sedangkan dalam praktik pelaksanaannya seperti di rumah ibadah, di madrasah dan pondok pesantren, termasuk pada sekolah minggu dan pasraman, materinya tidak menjadi materi pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan dengan nilai karakter bersahabat dengan aktivitas pendidikan dan pengajaran di lembaga yang bersangkutan. Selain itu, juga diintegrasikan dengan pembudayaan dalam interaksi edukatif. Indikatornya keterlaksanaan gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” ini cukup sederhana, yaitu apabila umat beragama, ASN Kementerian Agama, Dharma Wanita dan warga sekolah dan madrasah, sekolah Minggu, Pasraman, pondok pesantren, rumah ibadah, termasuk ormas keagamaan dan *stakeholder* terkait menjadikan karakter bersahabat sebagai dasar perilaku dan interaksi dalam kehidupan umat beragama. Demikian halnya bagi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara terbangun karakter bersahabat yang diindikasikan pada performa diri, lingkungan kerja dan layanan publik yang bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” ini lahir sebagai bentuk responsifitas dan partisipasi aktif Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan visi Kementerian Agama RI dan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun visi Kementerian Agama RI, yaitu mewujudkan Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sedangkan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat melalui Gerakan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Daratan dan Lautan atau Kepulauan (Garbarata) yang ditopang oleh lima pilar yaitu Sulawesi Tenggara yang Cerdas, Sulawesi Tenggara yang Sehat, Sulawesi Tenggara yang Peduli Kemiskinan, Sulawesi Tenggara yang Berbudaya dan Beriman serta Sulawesi Tenggara yang Produktif.

Dengan diberlakukannya “Gerakan Bersahabat” ini di Sulawesi Tenggara, khususnya di seluruh jajaran Kanwil Kementerian Agama baik di Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kantor Urusan Agama, Madrasah menjadi pilar utama dalam mewujudkan pondasi kedamaian di Sulawesi Tenggara. Dengan merawat persaudaraan yang baik, maka terciptalah suasana damai dan rukun sejahtera di masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Buton melalui Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat dapat menjadi solusi ampuh di dalam menciptakan

kedamaian di masyarakat. Hal ini, terwujud berkat kerja sama seluruh *stakeholder* di dalam merawat dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Seperti halnya di Kota Kendari selalu tercipta suasana damai karena kesadaran dari para pemeluk agama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat serta unsur pemuda. Pembangunan rumah ibadah selalu berdampingan seperti gereja dan masjid ada yang hanya berbatasan dengan tembok, ada juga yang bersebelahan jalan. Bahkan, ada umat Buddha yang membangun masjid untuk ummat Islam karena rasa persaudaraan dan sadar akan pentingnya kedamaian di mana pun berada.

Rekomendasi

1. “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” ini sangat relevan dan bersinergi dengan program Kota Kendari dengan berhasil menjalankan program “Persaudaraan Madani”. Untuk itu, penulis perlu menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dalam hal ini Menteri Agama melalui Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadikan kebijakan ini sebagai instrumen dalam menciptakan kondisi damai di masyarakat. Untuk itu, diharapkan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat untuk selalu mengefektifkan tugas dan fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di masyarakat. Hal ini, dimaksudkan untuk selalu merawat kerukunan beragama di masyarakat. Untuk itu, kehadiran Kebijakan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat menjadi penting dan perlu terus digaungkan “Gerakan Bersahabat” ini.
2. Dalam rangka mensinergikan Kebijakan Gerakan Kemenag Sultra

- Bersahabat dengan program Walikota Kendari Persaudaraan Madani, maka rekomendasi dalam hal ini Penentu Kebijakan khususnya Kepala Kanwil Kemenag Sultra melalui Bidang Penerangan Agama Islam perlu meningkatkan peran Baznas baik Provinsi maupun Kota Kendari melalui UPZ sehingga dapat meningkatkan program “Persaudaraan Madani”.
3. Kabupaten Buton yang pernah terlibat konflik sosial ekonomi di masyarakat dan berhasil menjalankan program kearifan lokal untuk mencunter hal tersebut tidak terjadi lagi maka direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa mensinergikan program “Gerakan Bersahabat” ini untuk berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Buton beserta seluruh jajaran terkait seperti Camat dan Desa setempat.

Selain itu, melalui “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat” para Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dalam hal ini Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buton melalui Kepala Kantor Urusan Agama melibatkan para penyuluh agama di masyarakat untuk menjaga dan merawat suasana kedamaian di masyarakat sehingga dapat menangkal terjadinya konflik laten antaretnis dengan melibatkan isu SARA, dan isu agama.

Selanjutnya, rekomendasi kepada pihak madrasah, khususnya Kepala madrasah di Kabupaten Buton, seperti kepala MAN 1 Buton, kepala MTsN 1 Buton, Kepala MIN 1 Buton, dan Kepala MIN 2 Buton agar melibatkan siswa dengan dewan

guru untuk menjadi pionir “Gerakan Bersahabat” di madrasah sehingga dengan kebiasaan pemberlakuan suasana yang damai di madrasah maka perilaku siswa di masyarakat dapat menjadi contoh teladan sekaligus sebagai roll model bagi anak atau pemuda sebayanya di masyarakat.

Demikian pula halnya kepada guru Pendidikan Agama Islam dan Agama lain di sekolah umum, dalam hal ini guru SD, SMP, dan SMA Buton untuk senantiasa menjadi teladan dalam menciptakan suasana damai dan merawat moderasi, baik internal maupun eksternal umat beragama. Untuk itu, dalam konteks ini perlu penulis merekomendasikan kepada para penentu kebijakan dalam hal ini Bupati Buton, Camat, dan kepala desa, di masyarakat dapat memanfaatkan pemuda dengan kegiatan yang positif dengan membentuk komunitas pemuda cinta damai dalam bingkai “Gerakan Bersahabat” dengan tagline 3-B Bersama, Bersatu, Bersaudara (Bersama Kita Bisa, Bersatu Kita Kuat, Bersaudara Kita Rukun).

Disarankan kepada Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Buton dan Kepala Kementerian Agama Kota Kendari untuk mensinergikan gerakan “Kemenag Bersahabat” dengan membentuk “Persaudaraan Madani”, yang implementasinya adalah memperbanyak kebaikan sehingga bisa menjadi contoh dalam masyarakat seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dapat mengadopsi atau mengadaptasi program pemerintah Kota Kendari, yaitu Program *One Help One* yang dicetuskan oleh Walikota Kendari, selanjutnya dibuatkan payung hukumnya, yang

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Diharapkan terjadi hubungan sosial yang harmonis antara sesama warga akan mengikis sikap hidup individual yang merasuk kebanyakan warga Kota Kendari, dengan menggugah kepedulian warga mampu untuk membantu pendidikan saudaranya yang kurang mampu, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan memberi beasiswa pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, atau memfasilitasi mendapatkan bantuan pendidikan dari pihak mana pun juga. Program ini merupakan program kebijakan yang konstruktif demi meningkatkan pendidikan dan pengajaran di Kota Kendari. Pola *One Help One* pertama memberdayakan pendidikan anak dari keluarga miskin oleh si kaya, atau si miskin oleh si mampu. Kedua, memberi pendidikan kepada si miskin (keluarga kurang mampu). Ketiga, memberi arahan untuk mendapatkan pendidikan yang layak demi kesejahteraan keluarga.

Beberapa konflik masih berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pola resolusi konflik yang dilakukan selama ini oleh pihak-pihak yang kompeten masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, kepada Bupati Buton dan *stakeholder* terkait lainnya perlu menerapkan pola-pola mediasi yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat setempat, dan para guru dan uztas di sekolah, di madrasah maupun di Pondok pesantren.

Pemerintah Kabupaten Buton saat ini belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dan mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi kekinian dalam penyelesaian konflik-konflik yang ada

di Kabupaten Buton. Akibatnya, upaya-upaya fasilitasi/mediasi oleh satuan tugas (dinas/badan) maupun oleh kalangan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Buton cenderung tidak berhasil mengantisipasi dan atau menyelesaikan konflik-konflik yang laten maupun yang sudah terjadi. Untuk itu, Bupati Buton perlu membentuk Satuan tugas yang bersifat adhock sebagai pilihan utama pemerintah Kabupaten Buton untuk mengefektifkan tugas-tugas ini, dan disertai dengan mekanisme atau protokol standar penyelesaian konflik yang disusun dengan melibatkan multi-*stakeholders* di Kabupaten Buton perlu dirumuskan sebagai panduan kerja bagi satuan tugas adhock.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bupati Buton beserta seluruh jajarannya yang telah mendukung sepenuhnya dalam menulis artikel ini. Terutama dalam bentuk pemberian data dan informasi sehingga bisa selesai tepat waktu.
3. Penulis mempersembahkan terima kasih yang tulus kepada Walikota

Kendari dan jajarannya karena telah memberikan data dan informasi tentang program “Persaudaraan Madani” untuk disinergikan dengan Kebijakan Kemenag Sultra Bersahabat. Dukungan data informasi yang valid sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

4. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak H. Zainal Mustamin, S. Ag., M. A. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku motivator dan inspirator bagi penulis yang selalu memberikan nasihat arahan serta masukan dan ide-ide inovatif demi penyelesaian tulisan ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Bapak, H. Muhammad Saleh, S. Ag. M. Pd. I. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara selaku atasan langsung yang selalu membimbing dan mengarahkan serta memberi masukan dan ide-ide kreatif.

REFERENSI

Buku

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irving M. Zeitlin. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadaru. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Robert Bogdan dan Steven J. Tailor. 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Terj. A. Khosin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Menejemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humatika.
- W. Mantja, Etnografi. 2005. *Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Cet. II: Malang: Wineka Media.

Jurnal

- Andi Syaiful Zainal. 2021. *Jurnal* <https://repository.penerbit eureka.com/media/publications/556955-persaudaraan-madani-implementasi-kebijak-ec3847c1.pdf>
- La Janu. 2017. Dalam, *Jurnal Universitas Haluoleo*:http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/La_Janu/1.AnalisisKonflik_di_Kab.Buton.pdf.<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/381>.<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/381/304>.
- Mawar, Lusi Andriyani, Armyn Gultom, Khofifah Ketiara. 2021. “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia”. Dalam, *Jurnal UMJ* <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit>.
- Rahmad. 2022. “Gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” dalam Perspektif Perencanaan: Suatu Kajian Teori dan Praktik Perencanaan Partisipatif”. Dalam, *Jurnal Robust: Research of Business and Economics Studies*, Volume 2, Nomor 1, April 2022. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>
- Tuwu, Darwin. 2017. “Implementasi Program Persaudaraan Madani di Kota Kendari”. Dalam, *Jurnal Deepublish*:http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/DarminTuwu/3.Buku Implementasi Program Persaudaraan.pdf.
- Wali Aya Rumbia. 2017. “Tinjauan Pelaksanaan Program Persaudaraan Madani di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari”. Dalam, *Jurnal Mega Aktiva UM Kendari*. <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal/article/view/66>.

Internet

- <https://regional.kompas.com/read/2021/11/23/084317178/kerusuhan-di-buton>
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik>
- Qoumas, Yaqut Cholil (2021, Desember). 7 Program Prioritas Kementerian Agama. <https://www.liputan6.com/news/read/4832714/setahun-menag-yaqut-dari-revitalisasi-kua-hingga-moderasi-beragama>. Accesed November 30, 2022.

Makalah Seminar

Mustamin, Zainal. 2021. “Gerakan Kemenag Sulawesi Tenggara Bersahabat”. *Makalah* disusun dalam Rangka Assesmen Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sultra).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2008 tentang Program. Persaudaraan Madani.

